Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Andini Yuliani; Tasya; Panca Joko Yesiko Yassin; Wiena Septiany. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, wiena22septi@gmail.com

ABSTRACT: Positivism is a trend in philosophy. Positivism is closely related to legal theory, but positivism assumes that legal theory is only related to positive law. The concept of positive law is clear evidence of the influence of positivism. The aim of the research is (1) to examine and analyze the influence of positivism on the Criminal Justice System in Indonesia, and (2) to examine how positivism theory expresses the values of justice and legal certainty. The method used in the research is normative legal study (normative juridical). The choice of this research method is based on the need to evaluate norms or regulations. The positive law system is closed and society's interpretation is limited. Law enforcers who interpret the law not openly are often felt to be inconsistent with justice in society. Therefore, legal certainty often conflicts with the value of justice.

KEYWORDS: Positivism, Justice, Legal Certainty, Positive Legal System

ABSTRAK: Positivisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat. Positivisme erat kaitannya dengan teori hukum, namun positivisme beranggapan bahwa teori hukum hanya berkaitan dengan hukum positif. Konsep hukum positif merupakan bukti nyata adanya pengaruh positivisme. Tujuan dari penelitian (1) untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh positivisme terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dan (2) untuk mengkaji bagaimana teori positivisme mengungkapkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi hukum normatif (yuridis normatif). Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi norma-norma atau peraturan-peraturan. Sistem hukum positif bersifat tertutup dan penafsiran masyarakat terbatas. Para penegak hukum yang melakukan penafsiran hukum tidak secara terbuka sering dirasa tidak sesuai dengan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum seringkali bertentangan dengan nilai keadilan.

KATA KUNCI: Positivisme, Keadilan, Kepastian Hukum, Sistem Hukum Positif

I. PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya untuk mencapai hidup teratur dan aman (Kansil, 1979). Maka dengan tujuan tersebut sejak lama manusia senantiasa dihadapkan pada masalah (problems), karena terjadinya pertentangan dan perbedaan budaya akibat dari suatu perkumpulan yang membuat diperlukannya hukum untuk mengatur tingkah laku agar memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan demikian sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia membuat hukum pidana menempati suatu kedudukan yang sangat penting karena untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dalam menyelesaikan masalah kejahatan di masyarakat. Hal ini membuat sistem peradilan pidana menjadi bagian penting dalam suatu mekanisme proses untuk penyelesaian kejahatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Terkait sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki makna yang cukup penting untuk tujuan keadilan dan kepastian. Istilah sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi makna yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penyelesaian kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Adapun beberapa ahli hukum menjelaskan pandangan mengenai sistem peradilan pidana yaitu menurut Satjipto Rahardjo adalah semacam kesatuan dengan tatanan tertentu dimana tatanan khusus ini menunjukkan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian yang membentuk suatu sistem sebagai rencana, metode, atau prosedur dalam melakukan sesuatu (Raharjo, 1991). Berbeda halnya dengan pendapat Satjipto Rahardjo, menurut Mardjono adalah sistem penanganan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana (Reksodiputro, 2007).

Namun praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kesenjangan antara perlakuan terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Hak dan kepentingan orang-orang yang menjadi korban tindak pidana seringkali terabaikan dibandingkan dengan para pelakunya sendiri, hal ini dapat dilihat baik pada tataran normatif maupun praktis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tujuan hukum pidana yang mengutamakan sasaran terhadap perbuatan terlarang (kejahatan) di samping pelakunya.

Akibatnya, keputusan hukuman yang tidak tepat yang dibuat oleh hakim mempunyai konsekuensi yang signifikan tidak hanya bagi mereka yang terlibat tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan; menciptakan reaksi yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang individu yang berbeda seperti sudut pandang masyarakat atau sudut pandang peradilan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti pemahaman yuridis saat menentukan putusan yang mempertimbangkan alasan sosiologis di baliknya.

Kerangka hukum di Indonesia condong ke arah filsafat positivisme: di mana hukum berfungsi sebagai pengetahuan yang valid dan bukan spekulasi metafisik yang dipikirkan secara acak oleh pembuat undang-undang. Sebelumnya diusulkan sekitar pertengahan abad ke-19 oleh John Austin, teori ini mengakui pengakuan arus utama karena memandang perintah dari otoritas tertinggi. dengan batas-batas yang ditentukan, pelanggaran dapat dihukum jika dilanggar. Konsep ini secara ketat memisahkan moralitas dari esensi sehingga pendirian empiris dipertahankan tanpa hubungan apa pun dengan pengalaman subjektif yang menunjukkan bahwa yurisprudensi sangat menghargai ketepatan obyektif atas keprihatinan seperti dikotomi benar vs salah.

Konsekuensinya, ada ketaatan yang ketat mengenai pemisahan antara legalitas yang dikaitkan dengan prinsip sosial yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dengan legalitas yang terdefinisi dan ideologi humanistik yang diturunkan dari rasa bersalah yang membawa perbedaan di antara berbagai bentuk tindakan & konsekuensi selanjutnya

dengan menggunakan prosedur dua cabang dari keyakinan hukum di sekitar yurisdiksi *odas solen* (fakta yang relevan yaitu *da sein* realitas tersebut). menumbuhkan kelemahan yang parah, menghilangkan dorongan dari perspektif holistik dan moral yang berdampak pada praktik yang disukai, alih-alih mengarah pada komitmen menuju rasionalitas & universal, yang secara berulang-ulang mengakibatkan motif prosedural yang tidak dapat diakses, berpihak pada kelompok yang memiliki hak istimewa, membinasakan komunitas yang lebih rentan, menderita kerugian yang tidak dapat dibenarkan meskipun mempertahankan kedudukan hukum yang tepat, didikte dengan setia, undang-undang yang diumumkan, muncul ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya yang jelas-jelas bertentangan dengan kepentingan mayoritas, membahayakan koherensi & kesetaraan masyarakat secara keseluruhan .

Ketika penegak hukum melakukan penyelesaian suatu tindak pidana yang menimbulkan pertentangan antara norma Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penerapannya. Maka akan membuat rasa kepercayaan masyarakat berkurang untuk meminta keadilan dan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum dimana sudah terdapat beberapa kasus-kasus yang bernilai rendah (*insignificant*), biasanya dilakukan oleh terdakwa yang dianggap kalangan bawah, hukum pidana seringkali tidak berpihak pada terdakwa tersebut dan ketika dihadapkan pada suatu kasus tertentu yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, hakim akan timbul kesulitan untuk dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum yang mana selalu muncul anggapan masyarakat bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

II. METODE

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif (yuridis normatif). Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi norma-norma atau peraturan-peraturan. Aturan hukum

yang akan dianalisis dalam penelitian ini terutama adalah KUHP atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan KUHPA atau Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengacu pada pendekatan undang - undang (statute approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang - undang digunakan untuk menganalisis peraturan yang terkait dengan tinjauan terhadap teori positivisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengevaluasi doktrin, asas, dan konsep dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, yakni meninjau teori positivisme hukum yang terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN

A. Teori Positivisme Hukum Hans Kelsen dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum Positif di Indonesia

Pemikiran tentang aliran positivisme dalam dunia literatur dipopulerkan oleh filsuf Perancis Auguste Comte dalam karyanya yang berjudul *Course de Philosophie Positive*. Akan tetapi, Johnny Ibrahim, dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, berpendapat bahwa aliran positivisme pertama kali muncul dari sebuah karya Henry Saint-Simon tahun 1811, yang berjudul *Memories sur La Science de l'homme*. (Ibrahim, 2006). Akan tetapi Comte-lah yang menyusunnya secara sistematis dan komprehensif dengan tujuan mengembangkan aliran pemikiran positivisme.

Dalam dunia hukum, aliran positivisme mulai populer setelah muncul pemikiran dari beberapa tokoh, antara lain John Austin dan Hans Kelsen. Walaupun keduanya mempunyai pandangan berbeda mengenai penggolongan positivisme hukum, akan tetapi keduanya tetap tergabung dalam rumpun yang sama. Positivisme hukum berpandangan bahwa harus ada pemisahan yang tegas antara hukum dan moralitas, antara hukum yang berlaku (*das sein*) dan hukum yang seharusnya

diterapkan (*das sollen*). (Erwin, 2013) Dalam asas hukum, aliran positivisme disebut dengan *legisme*, isme bermakna bahwa kewarganegaraan suatu bangsa hanya didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku yakni undang-undang.

Positivisme hukum berpendapat bahwa tidak ada hukum selain perintah penguasa yang memerintah, atau norma hukum ditentukan oleh negara dan sah jika didasarkan pada norma yang lebih tinggi. Para pengikut positivisme hukum memiliki pandangan bahwa tidak ada hukum lain selain hukum positif atau hukum yang berlaku. Hukum positif tentu berbeda dengan mazhab hukum lainnya yang berlandaskan pada moralitas, agama, dan adat istiadat masyarakat. Dalam aliran hukum positivisme, hukum tertulis sangat dijunjung tinggi, sehingga aliran ini beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Pandangan yang mengagung-agungkan hukum positif ini justru memandang terlalu tinggi kekuasaan yang berwenang membuat hukum tertulis dan menganggap hukum sebagai sumber kekuasaan.

Positivisme hukum atau hukum positif mempunyai dua kaidah tersendiri dalam perkembangannya. Pertama, yang diperkenalkan oleh John Austin yakni *Analytical Legal Positivism* atau hakikat hukum terletak pada aliran hukum positif analitis. Kedua, *Teori Hukum Murni* atau *The Pure Theory of Law* oleh Hans Kelsen. *Teori hukum murni* merupakan gagasan Hans Kelsen dimana ia lahir di Austria tetapi kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan klasifikasi hukum, dalam beberapa literatur Hans Kelsen dipandang sebagai pendukung positivisme hukum atau hukum positif. Kelsen berpendapat bahwa, ilmu hukum harus benar-benar murni dan terpisah dari kajian ilmu-ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu, ia mendirikan teori hukum murni. Sehingga awal mula positivisme hukum berasal dari aliran hukum murni Hans Kelsen.

Inti dari pemikiran positivisme hukum berkaitan dengan keyakinan, hukum yang ada, dan hukum yang berlaku pada saat ini, pada saat tertentu, dan tempat tertentu. Menurut August Comte sebagai pendiri awal aliran positivisme, bahwa ajaran positivisme didasarkan

pada pengalaman. Dengan kata lain, pengalaman dianggap benar karena dapat dibuktikan (diselidiki) dalam kenyataan oleh ilmu pengetahuan, maka dari itu dapat ditentukan bahwa sesuatu tersebut dinilai sesuai dengan kenyataan (kebenaran). Positivisme hukum (mazhab hukum positif) meyakini harus ada pemisahan yang tegas antara hukum dan moralitas antara apa yang ada dan apa yang seharusnya atau yang dikenal dengan *das sein* dan *das sollen*. Dalam perspektif positivisme, tidak ada hukum selain perintah penguasa. Bahkan beberapa mazhab hukum positif yang dikenal dengan mazhab *legisme* semakin teguh berpandangan bahwa hukum adalah undang-undang. (Rasjidi, 2012).

Positivisme hukum yang berpijak pada konsep positivisme merumuskan beberapa premis yang melahirkan keyakinan dasarnya. Salah satu kepercayaan tersebut menyatakan bahwa sistem hukum suatu negara tidak bersumber dari hukum alam atau kehidupan masyarakat, melainkan memperoleh bentuk positifnya melalui lembaga-lembaga yang berwenang. Keyakinan lain menekankan memandang hukum hanya dari segi formalisme dan memisahkannya dari muatan substantif karena dapat merusak kebenaran ilmiah.

Para pendukung positivisme hukum berupaya menggambarkan hubungan sebab akibat yang diwujudkan dengan menulis undang-undang yang mengikuti norma kausalitas. Meskipun demikian, Soetandyo Wignjosoebroto mencatat bahwa perilaku manusia mungkin kurang memiliki probabilitas dibandingkan dengan fenomena yang diamati mengenai perilaku benda-benda anorganik yang dipelajari berdasarkan fakta alam.

Indonesia yang kaya budaya dan heterogen menimbulkan tantangan karena penyatuan terpusat dalam wilayah tertentu membatasi kearifan lokal seperti hukum adat yang keabsahannya dapat terancam jika tidak didukung secara teoritis melalui kekuatan struktural yang dinyatakan serupa untuk sanksi yang dikenakan mengenai norma-norma yang dianggap penting bagi semua individu yang terlibat meskipun terdapat kesulitan yang timbul karena keteringgalan. Reformasi yang mendorong perkembangan masyarakat terkadang menimbulkan

resistensi terhadap keputusan yang dianggap tidak adil dan berdampak pada nilai-nilai keadilan yang dianut secara lokal (Soe-tiksno, 2004).

Friedman mengusulkan subsistem - Substansi Hukum yang menunjukkan aspek-aspek terkait konten sementara terstruktur secara hukum yang menangani sumber daya infrastruktur yang mengatur otoritas mencakup aparatur yang diberdayakan; terakhir terlibat dengan kegiatan budaya yang taat hukum menghubungkan partisipasi sadar selama proses pembentukan kritis yang melibatkan semua orang memungkinkan kepemilikan total melengkapai kekurangan yang ditemukan karena kedua penduduk bersama organisasi pemerintah menghasilkan budaya (Budaya Hukum).

Kelsen menyarankan bagaimana setiap pelanggaran harus melakukan intervensi dengan menghukum pihak-pihak yang berkepentingan di samping tindakan yang menjunjung tinggi prinsip harus melakukan hal tersebut secara normatif mengikat rasa negara yang diterapkan secara paksa terhadap setiap individu yang tetap bersyarat. Pilihan/keputusan yang dipengaruhi oleh praktik membuat CZ beroperasi dengan berbagai rincian substansial yang terjadi kemudian situasi yang dihadapi (Krisstev, 2011)

Berangkat dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia mempunyai cakupan yang sangat luas dan tidak terbatas pada permasalahan tekstual yang berupa peraturan perundang-undangan saja. Berfungsinya hukum dalam masyarakat tidak hanya memerlukan undang-undang tetapi juga hal-hal lain seperti budaya masyarakat, aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana. Dari sini kita dapat melihat bahwa aliran positivis berupaya membatasi hukum pada sifat tekstual semata.

B. Positivisme Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Selain keadilan dan kejelasan hukum, penerapan hukum juga dapat memberikan nilai manfaat seperti terpeliharanya hak individu dan keuntungan finansial. Namun, upaya mencapai tiga cita-cita dasar ini – keadilan, kepastian, dan kemanfaatan – dalam praktiknya merupakan tantangan yang sering kali berujung pada konflik di antara ketiga cita-cita tersebut. Keadilan substansial harus diutamakan meskipun bertentangan dengan kepastian hukum yang lebih menekankan pada penegakan hukum sesuai aturan yang ada dibandingkan mengakomodasi konsep keadilan yang sebenarnya. Prinsip legalitas harus menghormati keyakinan bahwa hukum ada untuk menjamin kepuasan, perdamaian, kebahagiaan & keadilan bagi semua orang, bukannya bersifat brutal atau tidak etis.

Oleh karena itu, hukum mencakup peraturan perundang-undangan tertulis serta fakta-fakta yang diamati melalui proses pengadilan; pandangan yang komprehensif memberikan keseimbangan moral sementara proses pengambilan keputusan memastikan pembenaran selama penerapan aturan (Unger 2010).

Positivisme hukum berpendapat bahwa memisahkan hukum dari moral menyederhanakan kepatuhan, namun pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi terutama dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8/1981 (Prahassacitta-2019). Kecenderungan legalistik hanya terfokus pada penerapan aspek-aspek eksternal mengabaikan konsep-konsep penting seperti kebenaran kebenaran yang mengakibatkan dampak negatif menjauhkan manfaat di tengah kemajuan ilmu pengetahuan memaksakan perspektif yang salah sepenuhnya melepaskan pengertian yang salah yang mendasari prinsip-prinsip etika yang disampaikan dengan mengikuti protokol yang sesuai yang diperbarui secara berkala bahkan ketika lembaga-lembaga yang sangat birokratis tidak memiliki nilai pribadi apa pun. sistem yang dibentuk secara individual menggeser klien journeymen heterogen yang

terdiri dari budaya yang berbeda jenis kelamin ras usia tingkat pendapatan rentang kelas lokasi geografis latar belakang pendidikan pengalaman profesional dll.

Upaya tekun yang gigih menciptakan struktur baru institusi yang mempromosikan kesetaraan inklusi menginformasikan pertumbuhan penelitian berkelanjutan yang mengungkapkan metode baru pemecahan masalah meningkatkan keberlanjutan ekonomi sosial politik membuat efisien kebijakan ekstraksi yang disederhanakan mengakui berbagai idealitas yang saling bertentangan, menjunjung tinggi faktualitas berdasarkan kebutuhan, dan pada saat yang sama menyebarkan kesigapan publik untuk mengantisipasi perubahan yang akan segera terjadi, sering bereksperimen memastikan terbatasnya korupsi, keterwakilan yang adil, umpan balik yang berkelanjutan, evaluasi penilaian, meningkatkan kapasitas keseluruhan, memperjelas ilmu pengetahuan, tatanan peradilan, parameter-parameter yang relevan, dinilai secara menyeluruh, digunakan, merehabilitasi, ditingkatkan, sesuai, menghasilkan solusi yang paling sesuai menuju pemahaman holistik terhadap permasalahan yang ada saat ini mengatur mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan, menciptakan peluang pertumbuhan masyarakat yang optimis.

IV. PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaannya hukum harus memperhatikan nilai fundamental, sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan 3 (tiga) nilai fundamental yang harus terdapat dalam hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun pada kenyataannya, sulit untuk menerapkan ketiga nilai fundamental tersebut secara seimbang. Dalam beberapa kasus, nilai kepastian hukum mungkin harus dikesampingkan demi mengedepankan nilai keadilan. Jadi muncul pertanyaan, manakah yang harus didahulukan, keadilan atau kepastian hukum itu sendiri.

Pada hakikatnya peradilan menjamin perlindungan hak dan sekaligus mengatur kewajiban agar seimbang antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Keadilan yang terkandung dalam teks suatu undang-undang dapat menjamin keadilan apabila ditegakkan oleh aparat penegak hukum, namun hanya sebatas keadilan prosedural yang memberikan jaminan ketertiban hukum dan kepastian hukum, namun belum tentu memberikan keadilan substansial. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan substansial, maka aparat penegak hukum harus memperhatikan realitas social (Malik, 2021).

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pengaruh positivisme dalam bidang hukum khususnya hukum Indonesia sangat kuat. Undang-undang Indonesia secara unik dibakukan, ditetapkan dan diberlakukan oleh negara, dan merupakan bukti nyata pengaruh positivisme. Pengaruh positivisme juga sangat kuat dalam praktik penyelesaian perkara di pengadilan. Misalnya saja membuktikan kebenaran suatu persoalan hukum atau undang-undang berdasarkan bukti-bukti yang konkrit dan empiris. Pengaruh positivisme juga terlihat pada sistem peraturan hukum yang seragam yang berlaku bagi seluruh warga negara, khususnya di bidang hukum pidana (Wahyuni, 2012).

Misalnya, beberapa kasus terkenal mendapat perhatian media yang intensif terkait dengan hukuman atas kejahatan yang relatif ringan, seperti pencurian tiga biji kakao, pencurian semangka, pencurian tiga kilogram kapas, dan pengisian daya ponsel di sebuah rumah sakit, apartemen. Itu dianggap kasus ringan oleh masyarakat, namun diperlakukan berat secara hukum.

A. Pengaruh Positivisme Hukum terhadap Sistem Peradilan Pidana dikaitkan Teori Keadilan.

Dalam implementasi hukum selalu bergantung kepada masyarakat dan aparat penegak hukum terutama pada kesadaran hukum itu sendiri, karena masih sering terjadi beberapa peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik, akibat adanya beberapa

oknum penegak hukum maupun masyarakat yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Sehingga peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum dengan aktivitas tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum tersebut.

Keadilan merupakan prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Konsep ini ada dalam berbagai bidang, termasuk hukum, filsafat, politik, dan sosiologi. Penerapan keadilan hukum mencakup beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Bahwa semua orang diperlakukan sama dan obyektif, tanpa diskriminasi atau pengecualian yang tidak dapat dibenarkan.
2. Bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mendapatkan perwakilan di pengadilan.
3. Bahwa putusan hukum harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan proses yang adil dimana hakim atau aparat penegak hukum bertindak netral dan tidak memihak (Rangkuti, 2023).

Jika melihat pelaksanaan saat ini beberapa menganut paham positivisme terhadap sistem peradilan pidana yang dapat mempengaruhi dalam proses melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapi untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Aliran positivisme hukum ini menyatakan bahwa hukum harus tertulis, sehingga tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sesungguhnya bermuara kepada positivisme hukum. Sehingga tanpa disadarinya dan diketahui bahwa aparat penegak hukum telah menyetujuinya dan berpikir mengenai aliran positivisme hukum ini menjadi suatu mekanis yang bekerja dalam penegakan hukum dengan mengabaikan rasa keadilan dan kebenaran yang seharusnya ada.

Penegakan hukum yang bersifat matematis dalam melakukan penyelesaian suatu tindak pidana ini akan berbahaya bagi para pencari keadilan dalam kondisi ekonomi yang terbatas, karena tidak ada cara untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Berbeda dengan entitas ekonomi yang sudah mapan dan kuat, penegakan hukum dapat di pengaruhi oleh mereka sesuai keinginan mereka, selama mereka bersedia bekerja sama. Positivisme hukum ini melebih-lebihkan kekuasaan membentuk dan menciptakan hukum tertulis sehingga menjadikannya sebagai sumber hukum yang mana bahwa kekuasaan adalah hukum itu sendiri (Riyanto, 2018).

Pada dasarnya lembaga penegak hukum melindungi hak dan mengatur kewajiban agar tetap terjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Maka keadilan yang terdapat di dalam teks peraturan perundang-undangan mungkin dapat memberikan keadilan ketika dijalankan oleh para aparat penegak hukum sesuai dengan kewajiban dalam pelaksanaannya. Tetapi jika hanya sebatas dari keadilan procedural yang memberikan jaminan terhadap ketertiban dan kepastian hukum, hal itu belum tentu memberikan keadilan secara substansial. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat memberikan keadilan secara substansial, para penegak hukum harus melihat kenyataan yang ada pada masyarakat. Agar aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum harus sesuai dengan peristiwa nyata tidak boleh menyimpang dan hukum harus berlaku sesuai dengan hukumnya, agar dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.

B. Pengaruh Positivisme Hukum terhadap Sistem Peradilan Pidana dikaitkan Teori Kepastian Hukum.

Pembentukan hukum positif berdasar kepada fakta-fakta konkrit dengan mengedepankan ketepatan, menjamin kepastian hukum, serta manfaat yang jelas dari hukum tersebut. Oleh karena itu dikenal konsep kaidah hukum konkret dan kaidah hukum abstrak. Dalam proses pembentukannya, hukum positif disusun dan dirancang dengan istilah-

istilah yang tepat, ungkapan yang tegas, kecermatan pengertian atau konsep, serta objek yang jelas. Hukum positif dirancang sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum, baik hukum dalam pelaksanaan maupun kepastian dalam hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah tujuan utama yang harus tercapai dan terealisasi. Dengan demikian hadirnya hukum harus bisa menciptakan kepastian hukum yang tertuju kepada keadilan (Syarifuddin, 2015).

Di bawah pengaruh paradigma positivis ini, hukum bertumpu pada kepastian hukum formal. Semula hal ini dianggap sebagai solusi yang tepat karena hakim dapat segera mengandalkan kitab hukum dan kodifikasi yang ada ketika dihadapkan pada permasalahan hukum. Hal ini tampaknya menjadi solusi yang sangat berguna dan efektif di bidang hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas, artikel ini membahas tentang pengaruh positivisme dalam ilmu hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, pandangan positivis terlalu mementingkan hukum formal dan kepastian hukum, serta mengesampingkan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum dan pendidikan hukum di Indonesia sehingga mengurangi permasalahan hukum yang terjadi.

Aparat Penegak Hukum Saat benar-benar menegakkan hukum, tidak boleh menyimpang dari hukum. Hukum harus diterapkan menurut hukum, dan inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan dan berarti seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya dalam keadaan tertentu.

Dengan adanya kepastian hukum maka tujuan hukum untuk menertibkan masyarakat dapat tercapai. Kepastian hukum lebih bersifat keyakinan yang dipaksakan dibandingkan keadaan sebenarnya. Artinya, tidak hanya hukum saja yang berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum, namun faktor lain seperti tradisi dan perilaku juga ikut berperan. Selain nilai keadilan dan kepastian hukum, hukum juga memberikan nilai manfaat dalam penegakannya. Utilitas dalam

pengertian ini bukan sekedar keuntungan semata, melainkan kemanfaatan hukum dalam masyarakat melalui perlindungan hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu, idealnya bentuk undang-undang harus mampu mempertimbangkan ketiga nilai fundamental tersebut (keadilan, kepastian, kemanfaatan), namun dalam praktiknya pengadilan tidak mampu mempertimbangkan ketiga nilai tersebut, sulit untuk dipertimbangkan. Di saat yang sama, konflik kerap muncul di antara mereka. Ketika nilai keadilan bertentangan dengan kepastian hukum, maka nilai keadilan harus diutamakan karena kepastian hukum sejatinya adalah upaya mencapai keadilan. Perlu ditegaskan bahwa keadilan yang diwujudkan dalam undang-undang lebih bersifat substantif dibandingkan keadilan prosedural, dan belum tentu dipenuhi oleh produk hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Malik, 2021).

Perlu diketahui bahwa Paham Positivisme Hukum juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di bawah ini merupakan kelebihan Paham Positivisme Hukum yaitu:

- 1) Adanya tatanan masyarakat yang teratur

Pemahaman tentang positivisme hukum (sering disebut dalam diskusi hukum sebagai legalisme dan positivisme hukum) telah diadvokasi di banyak negara selama berabad-abad. Perancis menetapkan hukum perdata pada awal abad ke-19, disusul oleh Jerman, Swiss, Belanda, dan lain-lain. Indonesia masih menggunakan kode yang diadopsi pada masa penjajahan Belanda, dan konon juga diadopsi oleh Perancis. Tatanan hukum positif ini menciptakan sistem dan ketertiban hukum yang kokoh dan tertib. Ketertiban masyarakat diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah (parlemen). Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara juga diatur dengan undang-undang. Hak-hak warga negara diakui dan dilindungi secara hukum, sehingga tidak perlu ditekan.

- 2) Kepastian hukum terjamin

Dengan menjamin hak-hak individu dan warga negara, maka hukum dapat menciptakan kepastian hukum. Akibatnya, mereka yang mengalami pelanggaran hak dapat mengambil tindakan hukum. Pemahaman hukum positivis melibatkan hukum tertulis yang telah diratifikasi oleh negara-negara untuk menjamin keandalannya. Setiap kali hakim menghadapi permasalahan hukum, mereka mengacu pada ketentuan yang mengikat secara hukum.

3) Keadilan melalui hukum

Sesuai dengan prinsip Positivisme, undang-undang tertulis yang dibuat oleh pemerintah memberikan jaminan keadilan melalui legalitas di semua kelas sosial tanpa memandang etnis atau gender yang menggambarkan perlindungan hak setiap warga negara yang dijamin dalam sistem ini tanpa pengecualian yang digambarkan sebagai dukungan yang setara terhadap setiap individu.”

Betapapun menguntungkannya, terdapat juga berbagai keterbatasan terkait yang terdiri dari;

1) Mengatasi komplikasi ketidakadilan sosial.

Kesulitan muncul ketika terjadi ketidaksetaraan dalam alokasi retribusi yang mempengaruhi skenario dunia usaha dan pendidikan sehingga mengganggu transparansi antara harapan akan kebenaran yang dianggap diperlukan secara sosial versus peraturan berbasis legislatif yang mewajibkan kepatuhan yang menyebabkan konflik menciptakan ketidakseimbangan tuntutan terhadap kondisi sosiologis dan kebutuhan mempengaruhi keadaan yang meringankan.

2) Terbatasnya penafsiran masyarakat karena struktur hukum positif yang tertutup

Pendekatan yang diterapkan oleh peradilan Indonesia saat ini termasuk paradigma positif yang diterapkan seringkali menimbulkan hambatan yang menimbulkan perbedaan di tengah persyaratan masyarakat mengenai keadilan peradilan yang menghambat persepsi

konvensional yang ditafsirkan tidak konsisten terhadap pendirian hukum yang mengupayakan interpretasi hukum yang terbuka memenuhi nilai-nilai etika sehingga mendorong integrasi kepercayaan transaksional yang menjunjung tinggi integritas di antara pihak-pihak yang terlibat.

3) Ketergantungan pada kekuasaan politik negara yang berdampak pada proses legislasi secara permanen

Perumusan peraturan desain Produk Hukum (kadang-kadang mengganggu kepentingan pembuat undang-undang), ketergantungan yang terus meningkat terlihat menunjukkan prinsip otoritas; modifikasi & ratifikasi yang diremaster menjunjung tinggi prasyarat keberadaan hak istimewa masyarakat yang lebih tinggi nampaknya didukung oleh kontingen pemerintah yang siap sedia (berkembang di mana-mana).

Mencermati pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting bagi positivisme, sedangkan utilitas dan keadilan dianggap lengkap dan dapat diakomodasi oleh kepastian hukum dalam bentuk peraturan hukum. Positivisme yang memandang hukum hanya sekedar peraturan hukum (undang-undang), tidak memungkinkan hakim untuk terlibat lebih jauh dengan hukum, sehingga hakim dipandang sebagai *la bouche de la loi* (hakim sebagai corong undang-undang).

Positivisme yang memandang hukum sebagai peraturan hukum negara, mempunyai pengaruh hanya mengejar kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan atau kemanfaatan hukum. Hakim tidak mempunyai kebebasan untuk mencari keadilan, namun hanya menerapkan hukum yang ada. Di sisi lain, kepastian hukum yang dicita-citakan positivisme tertinggal jauh dibandingkan kondisi sosial (Herry Herlambang, 2019).

Hal ini disebabkan karena dalam banyak fenomena sosial, cara-cara baru dalam bertindak yang melanggar hukum mungkin belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perilaku seseorang dalam melanggar hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah peran teknologi. Teknologi berkembang sangat pesat

sehingga sangat memungkinkan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat, namun belum diatur secara hukum. Salah satu contohnya adalah asas legalitas, yang pada prinsipnya dapat memberikan sanksi jika peraturan perundang-undangan yang ada memerlukan dasar hukum dalam penerapannya. Hal ini jelas menunjukkan adanya pengaruh positivisme hukum terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, jelas akan sangat sulit untuk mengikuti perkembangan masyarakat.

Positivisme hukum berpendapat bahwa jika sanksi menimbulkan kekosongan hukum ketika terjadi tindakan yang tidak sesuai norma masyarakat, maka harus ada undang-undang tertulis terlebih dahulu terhadap tindakan orang yang tidak sesuai norma masyarakat namun hukum belum mengaturnya. Dapat dimengerti bahwa hal ini terjadi karena ini hanyalah masalah kepastian, dan mengesampingkan keadilan atau kemanfaatan. Hal ini mengakibatkan sangat lambatnya tindakan legislatif untuk melindungi kehidupan masyarakat yang jelas dan sangat membutuhkan kepastian.

Sedangkan positivisme mengenai hukum dan penegakannya mengandung arti bahwa hukum digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan dan mengamankan kedudukan tersebut secara permanen dan permanen. Hukum negara, yang dipandang oleh positivisme hukum sebagai satu-satunya hukum, jelas akan menjadi alat untuk mengalahkan lawan politik dan memperpanjang umur kekuasaan. Hal ini tidak memperhatikan kemanfaatan dan keadilan yang dapat diperoleh dari penegakan hukum, dan menganggap peraturan hanya dengan melihat aspek hukum yang sebenarnya, sehingga secara hukum menundukkan pihak lain dan seolah-olah hukum itu tidak ada.

Yang terakhir, positivisme hukum juga mempunyai implikasi terhadap ilmu pengetahuan dan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum seperti jaksa, polisi, pengacara, dan hakim tidak mampu berfungsi maksimal untuk mengurai hukum. Praktisi diharapkan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan

nilai-nilai yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk menemukan hukum yang layak memberikan keadilan, kemaslahatan, dan keamanan bagi semua pihak, hanya mungkin dilakukan penegakan hukum di era sekarang ini tanpa adanya hak terobosan hukum (Herry Herlambang, 2019)..

V. KESIMPULAN

Berkembangnya berbagai aliran filsafat hukum menunjukkan perjuangan berkelanjutan untuk kemajuan intelektual di bidang ilmu hukum. Filsafat hukum yang sebelumnya hanya merupakan topik cabang yang dieksplorasi oleh para filsuf, kini telah berkembang menjadi bidang tersendiri yang diteliti oleh para ahli hukum itu sendiri. Postivisme Hans Kelsen mengenai hukum berpendapat bahwa unsur-unsur non-yuridis seperti perspektif sosiologis atau politik harus dihilangkan agar dapat berpegang teguh pada teori hukum murni; dimana pandangannya menganjurkan pengaturan perilaku manusia berdasarkan rasionalitas daripada etika dan sejarah.

Di Indonesia, hukum mempunyai cakupan yang sangat luas, lebih dari sekedar ketentuan perundang-undangan. Hal ini menuntut faktor-faktor seperti keragaman budaya dan alat penegakan hukum yang tepat serta fasilitas infrastruktur agar dapat berfungsi secara memuaskan dalam masyarakat." Dari perspektif ini, positivisme membatasi undang-undang hanya sampai interpretasi tekstualnya mencukupi.

Hal ini tidak dapat dibantah sepanjang waktu – peraturan perundang-undangan yang memegang kekuasaan memainkan peranan penting dalam memegang teguh keadilan: pengadilan diperkirakan dipandang sebagai kesempatan eksklusif yang tersedia bagi para pencari keputusan publik yang hak-haknya dirampas dari tempat lain. Hal ini secara paradoks menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia sikap terhadap Kemanusiaan justru justru mempromosikan peraturan tanpa banyak kepatuhan yang berarti.

Untuk mencegah penurunan lebih lanjut sehubungan dengan memburuknya status quo saat ini terkait masalah legalitas, reformasi kebijakan perlu diterapkan baik di dalam sistem pemerintahan maupun pendidikan hukum di seluruh dunia. Pendekatan positivis legalistik terhadap pengakuan undang-undang saja (terikat pada aturan), tidak akan pernah menghasilkan kebenaran integral mengenai penyangkalan filosofi kuno Silsilah positivisme(kebiasaan internasional yang positif).

DAFTAR REFERENSI

- Aviva, F. N. (2023, November). Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum. *Jurnal Relasi Publik* Vol.1 No.4, 9. doi:<https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>
- Barkatullah, T. P., Rasjidi, L., & Rasjidi, L. S. (2012). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Comte. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- DIANA PUJININGSIH, SH. ,MH. (2022). PENGARUH POSITIVISME DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA.
- Erwin, M. (2013). *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herry Herlambang, P. (2019). Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum. *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 1.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-2. Malang: Banyumedia Publishing.
- Kansil, C. S. T. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pustaka.
- Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat, MuhammadiyahUniversity Press, Surakarta, hlm. 6
- Kristeve, N. S. (2011). *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat: Studi Analitis Ajaran Marxis Tentang Negara dan Tugas-Tugas Proletariat di Dalam Revolusi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malik, F. (2021). TINJAUAN TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

INDONESIA. In Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (Vol. 9, Issue 1).
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4->

Nitibaskara, R. R. (2006). Tegakkan Hukum Gunakan Hukum. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Prahassacitta, V. (2019, Agustus 25). Pandangan Positivisme Hukum. Retrieved Desember 2023, 2023, from Business Law Binus: <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme-hukum/>

Raharjo, S. (1991). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.

Ramadhan, M. C. (2017). Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Warta , 53.

Rangkuti, M. (2023). Apa Itu Keadilan Dalam Hukum?. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>

Rasjidi, L. R. (2012). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum . Bandung: PT. Aditya Citra Bakti.

Reksodiputro, M. (2007). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan.

Riyanto, A. (2018). Pengaruh Positivisme Terhadap Penegakan Hukum. Business Law Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/pengaruh-positivisme-terhadap-penegakan-hukum/>

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

Sidiq, M. (2009). Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum. Prandya Paramita.

Syarifuddin, A. (2015). FILSAFAT POSITIVISME DAN ALIRAN HUKUM POSITIF. 1.

Soekanto, S. (2012). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soetiksno. (2004). Filsafat Hukum Bagian 1. Jakarta: PT> Prdanya Paramita.

Unger, R. M. (2010). Teori Hukum Kritis. Bandung: Nusa Media.

Wahyuni, S. (2012). PENGARUH POSITIVISME DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA.

Wignjosobroto, S. (2002). Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam & Huma.